

## DAFTAR PUSTAKA

### AL – QUR’AN dan HADIST.

#### A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta : UII Press cetakan pertama.
- Ali Rido. 2004. badan hukum dan kedudukan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf. Bandung : Alumni.
- . 2005. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf. Bandung: Penerbit Alumni.
- Andi Hamzah. 1994. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta : PT Pradnya Paramita. Anwar Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan. Jakarta : Kencana.
- Budi Untung. 2002. Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Chatamarrasyid. 2000. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2001. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Cet. I. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2002. Badan hukum yayasan: suatu analisis mengenai yayasan sebagai suatu badan hukum sosial. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali. 1991. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- 1997. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Daeng Naja. 2012. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

- Fred BG Tumbuan. 2002. *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang- Undang Yayasan*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya.
- Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. Gunawan Widjaya. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1990. *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting)*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- 1999. *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5*. Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama*. Jakarta : Dunia Cerdas.
- Hayati Soeroredjo. 1989. *Dalam makalahnya Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. 2002. *Pokok-pokok badan hukum yayasan- perguruan tinggi - koperasi - perseroan terbatas*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- , 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marhainis Abdul Hay. 1991. *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- , 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-29*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

- Rachmat Soemitro. 1979. Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan. Bandung : PT. Eresco.
- Rudi Prasetya. 2012. Yayasan dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung : Mandar Maju.
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1989. Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha. Jakarta. Soeroso. 1999. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1982. Hukum Acara perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- Suyud Margono. 2015. Badan hukum yayasan: dinamika praktek, efektivitas & regulasi di Indonesia. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2002. Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wirjono Projodikoro. 1966. Azas-azas Hukum Perdata. Bandung : Sumur Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387.

### **C. JURNAL DAN PENELITIAN ILMIAH**

Basuki Juni Nugraha, Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar, Tesis UNDIP, 2006.

Fitri Pratiwi Rasyid, Eksistensi Yayasan Sebagai Pihak Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Yayasan, Tesis Universitas Hasanudin, 2013.

- I Gusti Ayu Intan Wulandari, Eksistensi Dan Akibat Hukum Dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Lama Yang Tidak Berbadan Hukum Lagi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan, Tesis Universitas Udayana Denpasar, 2015.
- Ruly Anwar, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan Yang Dibuat Tidak Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pada Saat Dibuat, Tesis UNDIP, 2018.
- Bernadette Waluyo. 2002. Status hukum yayasan : menurut undang-undang nomor 16 tahun 2001 dan permasalahan yang dihadapi. *Jurnal Hukum Bisnis*; Vol.18 Maret 2002.
- Benhard Kurniawan Pasaribu dkk. Tanpa tahun. Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Danang Widoyoko. 2003. Undang-Undang Yayasan: Legalisasi Bisnis Militer, Artikel Dalam *Lentera Jurnal Hukum* Edisi 2 Februari 2003
- Dody Radjasa Waluyo. 2001. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat* edisi Oktober-Desember 2001.
- Lisman Iskandar. 1977. Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Majalah Yuridika* No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.
- R. Arry Mth. Soekowathy, 2003, "Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif", *Jurnal Filsafat*, Jilid 35, Nomor 3, Desember 2003.
- Rahmad Hendrea. 2011. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No 1.
- Setiawan. 1995. "Tiga Aspek Yayasan", *Varia Peradilan*, Tahun V, No. 55.
- Wawan Setiawan. 1995. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dan Otentik Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Hukum, Media Notariat*.

#### D. INTERNET

[http:// Matome M. Ratiba, 2013, \*Convecaying Law for Paralegals and Law Students\*, bookboon.com](http://Matome M. Ratiba, 2013, Convecaying Law for Paralegals and Law Students, bookboon.com). diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 20.00 WIB.

<http://JimlyAsshiddiqie.2012.‘‘Pemikiran:BadanHukum’’>.

<http://www.jimly.com/> diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

<http://umum-pengertian-blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

<http://id.wikipedia.org/wiki/notaris>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=yayasan> diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1587/pendirian-yayasan> diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t569f74b8b755e/pilihan-badan-hukum-untuk-organisasi-non-profit> diakses pada tanggal 7 Februari 2021.

<https://core.ac.uk/download/files/379/11723057.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31022/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<http://alwesius.blogspot.co.id/2012/04/status-hukum-yayasan-yang-belum.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

<http://rifatulhidayat-noor.blogspot.co.id/2013/01/yayasan-suatu-badan-hukum.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

<http://profile.ykkbi.or.id/pengertian-umum-yayasan.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

<http://magister-kenotariatan.blogspot.co.id/2013/02/akta-pendirian-yayasan-revisi.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

<http://eprints.undip.ac.id/11024/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

<https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.